



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1620, 2015

BPPT. Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 025 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN
DAN DINAMIKA PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Dinamika Pantai menjadi Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai dengan Peraturan ini;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN DINAMIKA PANTAI.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai yang selanjutnya di dalam peraturan ini disingkat BTIPDP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.
- (2) BTIPDP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BTIPDP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTIPDP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program di bidang infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai,
- b. pelayanan jasa teknologi di bidang infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai;
- c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan
- d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BTIPDP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- c. Seksi Program dan Jasa Teknologi.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai.
- (3) Seksi Program dan Jasa Teknologi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan pelayanan jasa teknologi di bidang infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTIPDP harus menyusun peta poses bisnis.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

BTIPD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

BAB V

ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI

LOKASI

Pasal 17

BTIPDP berlokasi di Yogyakarta.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagan Organisasi BTIPDP tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja BTIPDP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Pengkajian Dinamika Pantai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 026/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Dinamika Pantai tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 026/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Dinamika Pantai, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 026/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengkajian Dinamika Pantai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd.

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015

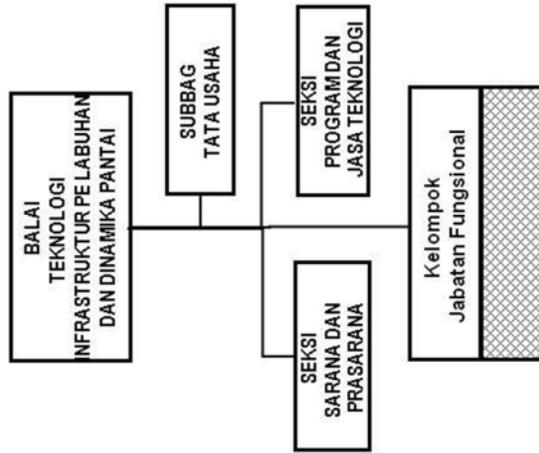
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN
DAN DINAMIKA PANTAI

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 025 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN
DINAMIKA PANTAI



KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/3185 /M.PAN-RB/9/2015
Lampiran : Tujuh Belas Berkas
Hal : Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT

30 September 2015

Yth.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat kami Nomor B/2491.1/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-120/KA.BPPT/SD/KP00.01/04/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Konsep Penataan Organisasi BPPT, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang meliputi penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, dan perubahan kedudukan unit organisasi.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi:

1. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca;
2. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pati;
3. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
4. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika;
5. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur;
6. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik;

7. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi;
8. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan;
9. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;
10. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bioteknologi;
11. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Polimer;
12. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi;
13. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain;
14. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Hidrodinamika;
15. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi;
16. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan
17. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi.

yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara yang ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan/atau Instansi Pemerintah di luar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

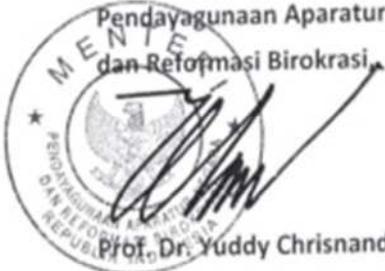
1. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi organisasi secara komprehensif sebagai acuan dalam menata organisasi di masa yang akan datang.

2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Dengan adanya penataan organisasi tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan eselon unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran Surat Menteri PANRB

Nomor : B/3185 /M.PAN-RB/9/2015

Tanggal : 30 September 2015

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

NO.	UNIT ORGANISASI	LOKASI	ESELON		
			II.a	III.a	IV.a
A. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi					
1.	Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik	Bali	-	1	3
2.	Balai Inkubator Teknologi	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			0	2	6
B. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam					
1.	Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca	Jakarta	1	3	7
2.	Balai Teknologi Survei Kelautan	Jakarta	-	1	3
3.	Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			1	5	13
C. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi					
1.	Balai Besar Teknologi Pati	Lampung	1	3	9
2.	Balai Bioteknologi	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			1	4	12
D. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material					
1.	Balai Besar Teknologi Konservasi Energi	Tangerang Selatan	1	4	4
2.	Balai Teknologi Polimer	Tangerang Selatan	-	1	3
3.	Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi	Tangerang Selatan	-	1	3
4.	Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			1	7	13
D. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancangan Bangun dan Rekayasa					
1.	Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika	Tangerang Selatan	1	3	6

NO.	UNIT ORGANISASI	LOKASI	ESELON		
			II.a	III.a	IV.a
2.	Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur	Tangerang Selatan	1	4	9
3.	Balai Teknologi Hidrodinamika	Surabaya	-	1	3
4.	Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi	Tangerang Selatan	-	1	3
5.	Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai	Yogyakarta	-	1	3
6.	Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			2	11	27
JUMLAH			5	29	71

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME